

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, N. S. (2021). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 1–208.
- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Universitas Negeri Surabaya*, 90(1), 21–30. <https://doi.org/10.1353/psg.2016.0212>
- Alvaro, R. (2022). Analisis determinasi efisiensi keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 130–152. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.59>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *APBD Kota Padang Tahun 2020-2024*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Halim, A. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Japar, M., Rustam, & Abdi, A. R. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(2), 161–175.
- Jejen, L. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 36–42. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i1.14>
- Juanda dan Heriwibowo. (2024). Pembentukan belanja daerah berkualitas dalam kerangka manajemen fiskal lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1).
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Ringkasan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Outlook Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2018). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Andi.
- Nender, A. (2018). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Putra, M. I. (2024). Implementation of performance-based budgeting in Indonesia's subnational governments. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2).

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Duta Nasindo Semarang.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10(April)*, 1–14.
- Sugiyono, P. D. (2018). Quantitative, qualitative, and R&D research methods. *Bandung:(ALFABETA, Ed.)*.
- Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah, Mitra Wacana Media*. Jakarta.